

Dinamika Kerja Sama Militer Mesir-Korea Utara

Rahma Arsyinta

Departemen Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

Surel : rahma.arsyinta-2014@fisip.unair.ac.id

ABSTRAK: Mesir telah menjalin kerja sama militer dengan Korea Utara sejak era Perang Dingin. Bagi Mesir, hubungan tersebut menguatkan militer Mesir yang memiliki kelemahan pada industri militer. Sedangkan bagi Korea Utara, hubungan militer dengan Mesir memfasilitasi kegiatan penjualan senjata militer di Timur Tengah dan Afrika Utara. Dalam perkembangan, hubungan di antara Mesir dengan Korea Utara juga berkembang pada sektor lain seperti diplomatik dan ekonomi. Namun, di tahun 2017 Mesir mengumumkan menghentikan kerja sama militer dengan Korea Utara. Penelitian ini kemudian dilakukan untuk mencari tahu penyebab Mesir menghentikan kerja sama militer dengan Korea Utara melalui penggunaan kerangka pemikiran pola relasi asimetris yang menjelaskan bahwa Amerika Serikat sebagai negara dominan memiliki aspek carrot yakni bantuan ekonomi dan militer bagi Mesir untuk turut menyesuaikan kebijakan dengan terlebih dahulu melihat faktor internal Mesir. Penelitian ini kemudian menemukan bahwa faktor eksternal yakni reorientasi kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat dari strategic patience menjadi tekanan dan keterlibatan maksimum atas program pengembangan rudal Korea Utara menjadi penyebab keputusan Mesir menghentikan kerja sama militer dengan Korea Utara sebab Amerika Serikat menerapkan sanksi sekunder kepada Mesir dengan menanggihkan bantuan ekonomi dan militer atas relasi yang terjalin dengan Korea Utara.

Kata kunci : penghentian kerja sama, relasi asimetris.

ABSTRACT : Egypt has been cooperating military with North Korea since Cold War. For Egypt, this relationship strengthened the Egyptian military which had a weakness in the military industry. As for North Korea, military relations with Egypt facilitate the sale of military weapons in the Middle East and North Africa. Relations between Egypt and North Korea also developed in other sectors such as diplomatic and economic. However, in 2017 Egypt announced cut military cooperation with North Korea. This research is conducted to find out the cause of the termination through seeing internal factor and the use of asymmetrical pattern of relations which the United States as the dominant country has economy and military assistance as a carrot for Egypt to adjust policy. This research then found that the external factors referred to the changing policy made by the United States from the strategic patience to the maximum pressure and secondary sanctions over North Korean missile development program related to Egypt's decision to cut military cooperation with North Korea because the United States apply secondary sanctions to Egypt through suspend economic and military assistance for the relationship that is established with North Korea.

Keywords : termination of cooperation, asymmetrical relations.

Pendahuluan

Militer Mesir merupakan salah satu angkatan bersenjata tertua dan terbesar di Timur Tengah. Sebagai kekuatan regional, militer Mesir memiliki misi untuk mencapai kepentingan nasional dan berkontribusi terhadap stabilitas regional. Dalam mencapai misi tersebut, Mesir menjalin hubungan militer dengan Democratic People's Republic of Korea atau Korea Utara untuk menguatkan militer Mesir yang memiliki kelemahan pada industri militer. Industri militer Mesir tidak memiliki basis teknologi dan infrastruktur modern yang diperlukan untuk merancang dan memproduksi senjata militer dengan teknologi canggih seperti tank, pesawat terbang, atau rudal (Directorate of Intelligence, 2012). Sehingga menjalin hubungan dengan Korea Utara mendukung transformasi militer Mesir dari yang semula angkatan bersenjata dengan tentara infanteri, angkatan udara yang lemah, dan angkatan laut berorientasi defensif menjadi angkatan bersenjata yang mencerminkan orientasi ofensif (Frisch, 2001). Sedangkan Korea Utara yang memiliki teknologi modern, menjalin hubungan militer dengan Mesir sebagai jaringan untuk memfasilitasi kegiatan penjualan senjata militer di Timur Tengah.

Hubungan militer antara Mesir dengan Korea Utara telah terjalin semenjak Mesir berada pada era pemerintahan Gamal Abdel Nasser. Nasser menyadari bahwa kurun waktu 1950 hingga 1960an merupakan puncak dari sentralitas dan kekuatan politik militer Mesir. Namun berbanding terbalik, dalam hal efektivitas militer angkatan bersenjata Mesir masih berada pada kondisi terburuk sehingga angkatan bersenjata membutuhkan perlengkapan dan persenjataan modern (Hashim, 2011: 67). Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perlengkapan dan persenjataan militer Mesir adalah dengan menjalankan program rudal. Mesir menekankan fokus pada program rudal selain untuk meningkatkan prestise militer, juga untuk mengimbangi negara-negara lain di kawasan, terutama Libya dan Israel, yang sedang mengejar proyek pengembangan dan produksi rudal sendiri (Directorate of Intelligence, 2012: iii). Korea Utara lantas dipilih sebagai rekan oleh Mesir karena keduanya berbagi solidaritas bersama dengan Uni Soviet dan Korea Utara telah menerima bantuan serta pelatihan rudal dari Uni Soviet sehingga mampu menyediakan teknologi dan bantuan material untuk program tersebut (Barnaby & Ritchie, 2004: 23). Namun program rudal tidak langsung terlaksana hingga akhir 1960an karena dinamika internal Mesir.

Walaupun realisasi upaya tersebut tidak kunjung terlaksana, kedua negara tetap menjalin relasi militer dengan baik. Pemimpin Korea Utara Kim Il-sung mengotorisasi bantuan keuangan ke Mesir sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pertahanan anti imperial Mesir dari intervensi militer yang dilakukan oleh Inggris, Israel, dan Prancis (Ramani 2017). Selain itu, ketika Mesir menghadapi Krisis Suez 1956, Korea Utara menunjukkan dukungan terhadap keputusan Mesir untuk menasionalisasi Terusan Suez. Kemudian delegasi diplomatik Korea Utara berkunjung ke Mesir untuk membangun hubungan konsuler yang memperkuat kerjasama militer ke depannya. Dukungan diplomatik Korea Utara diberikan tatkala Mesir melakukan upaya untuk mendorong keluar pasukan Inggris dari Yaman Selatan dan mengecam keras tindakan Israel saat Perang Enam hari 1967. Dukungan tersebut semakin meningkatkan kepercayaan antara Mesir dengan Korea Utara hingga mendorong komandan angkatan udara Mesir, Hosni Mubarak, meminta Korea Utara mengirim pilot untuk melatih pasukan militer Mesir dalam persiapan melawan Israel pada Perang Yom Kippur di tahun 1973. Sejumlah pilot Korea Utara pun bertempur dan meninggal karena membantu Mesir.

Berlanjut di era pemerintahan Anwar Sadat, perencanaan pertahanan militer Mesir tetap memiliki prioritas utama memperbaiki teknologi untuk mengembangkan rudal balistik jarak dekat dan kembali membuat pengembangan serta produksi rudal darat-ke-darat (Directorate of

Intelligence, 2012: 1). Setelah Uni Soviet mentransfer rudal Scud-B ke Mesir dan Perang Yom Kippur 1973 terjadi, Mesir berupaya mengembangkan Scud-B versi sendiri dan meminta bantuan Korea Utara untuk memperluas jangkauan dan akurasi rudal Scud-B milik Uni Soviet. Mesir memindahkan rudal Uni Soviet Scud-B ke Korea Utara sebagai bagian dari program pengembangan kooperatif untuk merekayasa balik rudal tersebut. Korea Utara merekayasa rudal Scud-B, membuat sejumlah perubahan untuk meningkatkan keakuratan dan memperluas jangkauan. Program Scud ini terdiri dari tiga fase. Fase pertama, Mesir melakukan uji coba rudal yang dirakit di Korea Utara. Fase kedua, menguji perangkat Scud yang disediakan oleh Korea Utara dan mengembangkan instrumen serta infrastruktur yang memungkinkan Mesir untuk memproduksi semua komponen. Fase terakhir, Mesir memulai serangkaian produksi rudal dengan sedikit ataupun tanpa bantuan dari Korea Utara (Directorate of Intelligence, 2012: 12).

Pada tahun 1980, Mesir dan Korea Utara pun menandatangani perjanjian kerja sama dan pertukaran teknologi rudal (Barnaby & Ritchie, 2004: 23). Dalam kerja sama ini, kedua pihak melakukan pertukaran informasi teknis, dokumentasi, dan personel. Di tahun yang sama, Korea Utara juga memperoleh sejumlah rudal Scud-B dari Mesir dan mulai melakukan modifikasi terhadap rudal tersebut. Mesir mengirimkan sejumlah rudal R-17E, MA 2-543 TEL, beserta kendaraan dan perlengkapan pendukungnya untuk rekayasa balik sekaligus sebagai imbalan atas janji Korea Utara membantu produksi Scud Mesir (Swaine & Ranyon, 2002: 27).

Kemudian di era pemerintahan Hosni Mubarak, Korea Utara memaksimalkan potensi rudal berbasis Scud dalam bentuk rudal Nodong jarak 1000 km yang berhasil diuji coba pada Mei 1983. Pada 1984, teknisi Korea Utara di Pabrik Rudal Chamjin merekayasa ulang Scud-B untuk memproduksi prototype pertama, bernama Hwasong-5. Dari upaya Korea Utara, Mesir menerima rudal Scud-B lengkap beserta informasi desain dan bantuan untuk memproduksi Scud-B secara lokal. Pada 1985, intelijen Amerika Serikat mengidentifikasi sekitar 40 hingga 50 teknisi Korea Utara yang ditempatkan di Mesir membantu mendirikan fasilitas produksi di Heliopolis. Lalu pada tahun 1986, kementerian pertahanan menegosiasikan lisensi untuk produk Scud Korea Utara sedangkan Korea Utara kembali melakukan peningkatan Scud-C jarak jauh. Setahun setelah negosiasi, berlangsung penandatanganan kesepakatan untuk pengiriman teknologi rudal ke Mesir (Barnaby & Ritchie, 2004: 23). Mesir dan Korea Utara mengumpulkan prototipe rudal serupa Scud yang diuji di Mesir dalam jangkauan maksimum 300 kilometer. Setelah itu hingga 1996, setidaknya Korea Utara telah tujuh kali mengirimkan bahan untuk Scud-C termasuk lembaran baja dan peralatan pendukung (Winconsin Project, 2000). Tujuan Mesir adalah membangun Scud-C Korea Utara versi sendiri yang mampu mencapai 600 kilometer disesuaikan dengan muatan dan memiliki akurasi yang baik daripada Scud-B.

Kemitraan dalam bidang militer dan pertahanan semakin bertahan dan diperkuat melalui komunikasi berkelanjutan di antara pemimpin kedua negara yang memiliki kepentingan ekonomi bersama. Interaksi kedua negara dikonsolidasikan melalui tiga kunjungan Mubarak ke Korea Utara dari tahun 1980 hingga 1990 yang kemudian menjadi dasar investasi Mesir dalam perekonomian Korea Utara. Bukti paling terlihat dari kesediaan Mesir untuk berinvestasi di Korea Utara adalah pendirian Koryolink oleh Orascom, perusahaan telekomunikasi asal Mesir. Koryolink merupakan perusahaan patungan Mesir dengan Korea Utara yang menyediakan satu-satunya jaringan telepon seluler 3G di Korea Utara (BBC, 2013). Orascom menginvestasikan lebih dari \$400 juta dengan hasil dari kesepakatan bisnis ini memberi Orascom 3.000.000 pelanggan baru di Korea Utara. Kemudian, kendati Mesir mengalami revolusi di tahun 2011, hubungan Mesir-Korea Utara tetap terjalin utuh.

Di era pemerintahan Abdel Fattah al Sisi yang terpilih pada tahun 2014, Mesir pun menguatkan pendahulunya terkait kebijakan terhadap Korea Utara dan menolak untuk memberlakukan sanksi PBB terhadap Korea Utara (Kirk, 2011). Langkah Mesir untuk menjaga hubungan dengan Korea Utara dapat dilihat melalui dua faktor. Pertama, Korea Utara telah membantu membimbing militer Mesir untuk menghasilkan sistem rudal sendiri, dengan kompensasi menggunakan ketentuan *hard currency*. Bantuan Korea Utara tersebut membantu Mesir mengurangi ketergantungan pada impor senjata asing dan memungkinkan Mesir untuk melakukan modernisasi militer tanpa bergantung terus pada Amerika Serikat dan Rusia. Mesir tidak dapat mewujudkan tujuan mencapai kemandirian dalam produksi senjata modern karena sistem perencanaan dan penganggaran militer yang lemah, kultur kerja yang tidak efisien, kekurangan manajemen dan tenaga kerja terampil, ketergantungan pada teknologi asing, dan ketidakmampuan untuk bersaing di pasar senjata internasional (Directorate of Intelligence, 2012: iii). Maka kemudian relasi dengan Korea Utara lebih kepada dukungan bimbingan untuk memproduksi senjata militer modern, terutama sektor kedirgantaraan, melalui pengiriman teknisi dan kunjungan secara aktif daripada hanya bergantung secara terus menerus pada teknologi asing lainnya. Mesir lebih mengandalkan Korea Utara karena konsiderasi kebijakan luar negeri dan keinginan untuk mempertahankan keanekaragaman teknologi senjata. Kedua, pemerintah Mesir menolak untuk dilakukan inspeksi terhadap program energi nuklirnya sementara Amerika Serikat dan Rusia menentang pengadaan senjata nuklir di Mesir. Lantas, Korea Utara dapat menjadi distributor bahan nuklir jika Mesir butuh untuk menghidupkan kembali program nuklir (Ramani, 2017).

Pada era pemerintahan Sisi, Mesir mengundang Kim Jong-un untuk menghadiri pembukaan rancangan ulang Terusan Suez di tahun 2015 (Suter, 2017). Kim Jong-un lantas mengutus Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara, Kim Yong-nam untuk hadir. Selain itu di era Sisi, kota Port Said Mesir menjadi titik penting bagi hubungan militer kedua negara. Port Said digunakan sebagai tempat transfer persenjataan rudal menengah dan misil darat serta ekspor senjata ke Mesir dan negara-negara sekitar (Leone, 2017). Selain itu Mesir mengizinkan diplomat Korea Utara untuk menggunakan kedutaan Mesir sebagai basis penjualan militer di seluruh wilayah (Walsh, 2018). Mesir juga memesan roket dari Korea Utara senilai jutaan dollar untuk kebutuhan militer Mesir yang dikirimkan pada anak perusahaan Arab Organization for Industrialization (AOI) yaitu Sakr Factory for Developed Industries, sebuah perusahaan riset dan pengembangan rudal utama Mesir, di tahun 2016. Pesanan tersebut diantar melalui kapal yang berisi 24.000 roket peluncur granat serta 6.000 komponen pelengkap (Warrick, 2017).

Namun, pada September 2017 Kementerian Luar Negeri Mesir mengeluarkan laporan bahwa Mesir mengecam uji coba nuklir Korea Utara dan memperingatkan keamanan regional. Mesir menyatakan prihatin atas ketidakpatuhan Korea Utara terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dengan melakukan uji coba rudal keenam (Arab Republic of Egypt Ministry of Foreign Affairs, 2017). Kemudian menyusul pernyataan tersebut, Menteri Pertahanan Mesir Sedky Sobhi bertemu dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan Song Young-moo melakukan kesepakatan untuk memperdalam kemitraan di antara kedua negara terkait pengembangan senjata dan mengenai isu Korea Utara (Yonhap, 2017). Mesir secara aktif bekerja sama dengan Korea Selatan, yang notabene bersitegang dengan Korea Utara, untuk melawan tindakan Korea Utara yang mengancam perdamaian dan stabilitas internasional. Kedua belah pihak juga sepakat untuk memperluas kerja sama bilateral di industri pertahanan. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kerja sama, Mesir berencana untuk membuka kantor atase pertahanan di Seoul. Sobhi juga menekankan bahwa Mesir telah menghentikan semua hubungan kerja sama militer

dengan Korea Utara terutama pada program pengembangan rudal serta transfer persenjataan dan memantau kegiatan para diplomat Korea Utara (Soliman, 2017).

Pembahasan

Di era Presiden Sisi, terjadi peningkatan keterlibatan lembaga keamanan dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Mesir, terutama kaitannya dengan masalah keamanan. Hal tersebut dikarenakan Mesir tidak memiliki alat ekonomi yang dibutuhkan untuk melakukan *quiet diplomacy* berdasar soft power karena cara tersebut bergantung pada kekuatan ekonomi dan Presiden Sisi berupaya mempertahankan hubungan baik dengan militer (Ragab, 2018). Selain keterlibatan militer, dalam pengambilan keputusan Presiden Sisi menunjukkan pendekatan reaktif yakni hanya beraksi ketika berada di bawah tekanan (Crisis Group, 2017). Pengambilan keputusan juga melihat lingkaran konsentris Mesir. Mesir mendefinisikan posisi atau hubungan dengan negara lain melalui tiga lingkaran konsentris. Pertama adalah negara tetangga yang berbagi perbatasan langsung, identitas fundamental, serta akses ke Sungai Nil. Kedua ialah kelompok asing dan kekuatan regional di luar lingkup langsung Mesir yang memiliki pengaruh kuat atas kebijakan Mesir. Ketiga yaitu hubungan dengan seluruh dunia, negara-negara yang tidak memainkan peran penting di lingkungan terdekat Mesir tetapi memiliki hubungan yang saling menguntungkan (Fahmy, 2012). Berdasar lingkaran konsentris tersebut, Amerika Serikat menempati posisi kedua.

Pola Relasi Asimetris antara Mesir dengan Amerika Serikat

Hubungan Mesir dengan Amerika Serikat dikarakteristikkan menjadi hierarki binasional yang mana subordinasi Mesir berasal dari asimetri politik dan ekonomi (El-Fadl, 2015). Subordinasi Mesir atas Amerika Serikat dapat terlihat pada internal Mesir maupun hubungan eksternal Mesir. Pada hubungan eksternal Mesir, normalisasi yang dilakukan Mesir dengan Israel melalui Perjanjian Camp David 1979 merupakan kepentingan Amerika Serikat untuk menormalkan posisi Israel di Timur Tengah. Selain itu Mesir hanya memiliki enam aliansi independen dari Amerika Serikat, sementara negara lain rata-rata memiliki sembilan aliansi independen (El-Fadl, 2015). Sedangkan dari hubungan internal, Mesir menerima proyek-proyek pembangunan dan bahan-bahan distributif dari Amerika Serikat serta mengizinkan NAMRU-3, unit penelitian medis angkatan laut Amerika Serikat, untuk tetap berada di Mesir (Zimmerman, 2017: 215). Selain itu, Amerika Serikat memiliki pengaruh besar atas institusi domestik Mesir seperti peradilan, parlemen, partai oposisi, dan para intelektual Mesir. Sebagai contoh adalah kemenangan Muhammad Morsi dalam pemilihan presiden 2012. Pengumuman hasil pemilihan ditunda hingga Morsi memberi jaminan kepada Amerika Serikat bahwa akan mematuhi perjanjian dan persetujuan yang telah disepakati oleh rezim sebelumnya, terutama Perjanjian Camp David (Khan, 2006: 74).

Di era Presiden Sisi, kebijakan ekonomi Amerika Serikat atas Mesir sebagian besar berkuat pada pemberian bantuan. Mesir merupakan penerima bantuan ekonomi Amerika Serikat terbesar kedua setelah Israel. Jika merujuk pada perbandingan jumlah PDB dan besarnya bantuan yang diberikan, Mesir bukan merupakan negara miskin namun menerima bantuan ekonomi terbesar sehingga dengan demikian maksud dari pemberian bantuan adalah untuk memajukan agenda kebijakan luar negeri Amerika Serikat (Howmuch.net, 2015). Melalui bantuan ekonomi, Amerika Serikat menghasilkan transformasi dalam kebijakan pemerintah Mesir dengan melengkapi alat politik dan militer serta membuka pintu ke sumber-sumber lain dari bantuan global, termasuk lembaga keuangan internasional dan organisasi non pemerintah dalam sistem internasional yang didominasi Amerika Serikat. Bantuan diselaraskan kebijakan Mesir dalam orbit Amerika Serikat

melalui penggunaan instrumental privatisasi dan kemitraan yang ditargetkan dengan elit otokratis dan sekutu kapitalis. Metode ini diperlukan untuk penyelarasan dengan sasaran strategis dan ekonomi Amerika Serikat. Dengan demikian, pada dasarnya fokus stabilitas hanya mendorong pada pembentukan struktur keterlibatan politik dan sebagaimana norma dalam hubungan asimetris, ancaman kehilangan akses dan bantuan memiliki dampak pada penentuan kebijakan domestik maupun luar negeri Mesir. Transformasi kebijakan luar negeri Mesir pun berkolerasi dengan perubahan dalam posisi relasi sistem negara dominan-subordinat.

Selain bantuan ekonomi, kehadiran kekuatan militer Amerika Serikat di Mesir memungkinkan Amerika Serikat untuk mempengaruhi kebijakan keamanan dan menahan kemungkinan inisiatif kebijakan luar negeri Mesir. Kehadiran militer Amerika Serikat dapat terlihat pada produksi bersama industri militer seperti tank M1 Abrams, perawatan tingkat depo, dan perbaikan pesawat kargo serta eksistensi di pangkalan Kairo Barat yang memiliki posisi global dengan tipe lokasi keamanan kooperatif dan dilengkapi dengan pasukan komando mobilitas udara, area persiapan sebelum operasi militer, dan pengisian bahan bakar (Lynn, 2012). Fasilitas demikian selaras dengan kepentingan dan kebutuhan Amerika Serikat untuk area persiapan operasi militer di luar wilayah Amerika Serikat, dukungan, dan area penyimpanan material. Di samping kehadiran kekuatan militer, Amerika Serikat juga turut andil dalam pembiayaan militer Mesir. Sejak menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979, Mesir secara konstan menerima bantuan militer dari Amerika Serikat sekitar \$1,3 miliar setiap tahun, mencakup 80% dari biaya pengadaan senjata Mesir dan merepresentasikan 25% dari pengeluaran tahunan Mesir (Ottoway, 2016: 200). Bantuan bukan berupa uang tunai melainkan dalam bentuk barang sehingga Mesir menerima senjata, peralatan, dan suku cadang untuk mengembangkan sistem persenjataannya. Program demikian disebut sebagai Foreign Military Financing (FMF) memungkinkan pemerintah Mesir untuk menerima peralatan dan pelatihan militer secara langsung dari pemerintah Amerika Serikat maupun melalui saluran komersial Amerika Serikat yang dikelola oleh Departemen Luar Negeri tetapi dilaksanakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat (CSR Report, 2017: 25). Secara operasional, bantuan tersebut memungkinkan militer Amerika Serikat untuk mempertahankan kiprah yang tinggi di wilayah Timur Tengah.

Reorientasi Kebijakan Amerika Serikat atas Program Rudal Korea Utara

Amerika Serikat menghadapi ancaman pengembangan rudal Korea Utara. Sejak Kim Jong-un menjadi pemimpin Korea Utara pada tahun 2011, Korea Utara lebih giat memajukan kemampuan rudal. Dalam kurun waktu enam tahun, jumlah uji coba rudal yang dilakukan Kim Jong-un melebihi akumulasi uji coba yang dilakukan Kim Il-sung dan Kim Jong-il. Intensitas uji coba rudal Korea Utara tersebut seiring dengan pencetusan doktrin byungjin oleh Kim Jong-un yakni pembangunan ekonomi berjalan beriringan dengan pengembangan program rudal Korea Utara (Wertz, 2017: 5). Meskipun terdapat upaya internasional untuk membatasi program rudal Korea Utara ini melalui sanksi dan larangan, Korea Utara terus meluncurkan kemampuan baru yang dapat menambah nilai Korea Utara dalam peperangan dan kemampuan *second strike*. Selain itu berfungsi sebagai alat untuk menjamin keberlangsungan rezim terhadap ancaman militer eksternal dan sebagai sumber *hard currency* tanpa secara substansial mengubah struktur fundamental ekonomi yakni dengan terlibat dalam kegiatan terlarang (Scobell & Sanford 2007: ix-3). Melakukan teknologi rudal atau material ke negara lain merupakan sumber *hard currency*, yang kemudian mendorong pengembangan program senjata nuklir yang berkelanjutan.

Upaya terbaru program pengembangan rudal Korea Utara berfokus pada pengembangan rudal jarak jauh yang memiliki potensi untuk menjangkau wilayah Amerika Serikat (Wertz, 2017: 2). Di

tahun 2017, dalam pidato tahun baru Kim Jong-un mengklaim Korea Utara dapat segera menguji rudal balistik antarbenua. Rudal balistik antarbenua dinilai sebagai indikasi terakhir dalam estimasi kekuatan karena dinilai memiliki kemampuan untuk menembakkan senjata nuklir dan memungkinkan suatu negara melancarkan serangan berat terhadap musuhnya yang berada di wilayah lain. Klaim rezim Korea Utara bahwa telah berhasil melakukan uji coba rudal balistik antarbenua diverifikasi oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson yang menggambarkan uji coba sebagai eskalasi baru dari ancaman Korea Utara ke Amerika Serikat, sekutu dan mitra kami, kawasan dan dunia (McCurry, 2017).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Amerika Serikat dihadapkan pada peningkatan pengembangan program rudal Korea Utara yang kemudian mendorong Amerika Serikat untuk meningkatkan pencegahannya sendiri sebagai respons karena dinilai sebagai ancaman keamanan utama yang dapat mengancam pusat populasi dan aset militer Amerika Serikat. Pada NSS 2015, Amerika Serikat menguraikan visi untuk menerapkan kebijakan *strategic patience* sebagai sarana mendesak Korea Utara melakukan negosiasi penghentian program pengembangan rudal. Pendekatan kebijakan *strategic patience* melibatkan peningkatan tekanan sanksi terhadap Korea Utara dan kembali melakukan perundingan hanya setelah Korea Utara mengambil langkah-langkah menuju denuklirisasi (Arms Control Association, 2017). Namun, *strategic patience* gagal memperoleh hasil yang diinginkan karena kesalahan kalkulasi dari Amerika Serikat atas pengaruh budaya yang mendasari pengambilan keputusan Korea Utara serta kegagalan Tiongkok dan Rusia dalam menegakkan sanksi ekonomi secara konsisten sebagaimana telah dikenakan DK PBB. Prekondisi yang memberatkan dalam pendekatan kebijakan pemerintahan Obama, ditambah dengan kegagalan untuk memberikan insentif yang cukup, menghalangi dimulainya kembali negosiasi dengan Korea Utara. Sebaliknya, Korea Utara justru memperluas persediaan bahan nuklir yang bisa digunakan untuk senjata, melakukan empat uji coba nuklir, dan mempercepat kegiatan pengembangan rudalnya.

Sementara itu, Presiden Trump memaparkan dalam NSS 2017 bahwa era *strategic patience* telah berakhir serta menegaskan jika Amerika Serikat bekerja sama dengan sekutu dan mitra untuk mencapai denuklirisasi yang tuntas dan dapat diverifikasi di Semenanjung Korea serta mempertahankan rezim non proliferasi di Asia Timur Laut (White House, 2017). Presiden Trump juga merespons dengan mengadopsi strategi tekanan dan keterlibatan maksimum melalui tindakan ekonomi dan diplomatik yang bertujuan membuat Korea Utara mengubah perilaku. Strategi ini menggabungkan retorika diplomatik, perundingan, dan peningkatan sanksi. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson menyebutkan upaya yang dimaksud mencakup kerja sama dengan mitra regional demi meningkatkan isolasi dan tekanan ekonomi pada Korea Utara serta menerapkan sanksi sekunder bagi negara yang tidak turut menegakkan sanksi PBB (Arms Control Association, 2017).

Amerika Serikat memberlakukan sanksi sekunder untuk meningkatkan tekanan terhadap Korea Utara melalui entitas negara ketiga yang melakukan bisnis dengan Korea Utara (Wertz, 2017: 11). Penerapan sanksi sekunder dimaksudkan untuk menghambat perkembangan, memutus rantai pasokan peranti rudal, mencegah potensi penggunaan dan penyebaran sistem pertahanan rudal Korea Utara menggunakan negara ketiga sebagai titik tekan ekonomi. Sanksi sekunder membuat Korea Utara lebih sulit untuk memperoleh *hard currency* atau teknologi yang diperlukan untuk memajukan program rudal. Jika dengan kebijakan keamanan, Korea Utara sulit untuk berunding dan menjalin kesepakatan dengan Amerika Serikat. Sedangkan jika melalui sanksi ekonomi, sulit bagi Korea Utara mengembangkan kerja sama ekonomi maupun di bidang lainnya termasuk keamanan.

Penyesuaian Mesir terhadap Reorientasi Kebijakan Amerika Serikat

Pada 5 Agustus 2017 Presiden Trump memberlakukan sanksi yang menargetkan ekspor utama Korea Utara termasuk batu bara, besi, timbal, bijih besi, bijih timah, dan makanan laut, serta kemitraan bisnis antara perusahaan asing dan bank Korea Utara (Wertz, 2017: 11). Kemudian diberlakukan pula larangan interaksi keuangan, perdagangan di seluruh sektor industri, serta interaksi dengan Korea Utara dalam berbagai aktivitas seperti usaha patungan dengan entitas Korea Utara dan penggunaan pekerja Korea Utara. Akibat pemberlakuan tersebut, hampir seluruh barang ekspor utama Korea Utara dilarang di pasar internasional, memangkas impor minyak dan ekspor batu bara, dan lonjakan harga komoditas di Korea Utara. Menurut data pabean yang diterbitkan oleh mitra dagang, nilai ekspor Korea Utara pada tahun 2017 menurun lebih dari 30% dibanding tahun 2016 sebesar \$2,7 miliar (Cha & Katz, 2018). Pemerintahan Trump juga mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk secara signifikan memotong dan / atau menghentikan hubungan dengan Korea Utara.

Dari sudut pandang sanksi, hubungan perdagangan internasional Korea Utara membentuk lingkungan sasaran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson menyatakan Amerika Serikat mengambil langkah tambahan termasuk memberlakukan sanksi sekunder dan menargetkan pihak yang terus melakukan interaksi dagang dengan Korea Utara (Fisherman et. al., 2017). Dengan menggunakan sanksi sekunder, Amerika Serikat dapat menghalangi hubungan Mesir dengan Korea Utara melalui ancaman memasukkan Mesir yang terlibat transaksi maupun relasi dengan Korea Utara dalam daftar hitam. Hal tersebut tentu merugikan Mesir maupun perusahaan Mesir yang ingin beroperasi secara internasional karena sebagian besar transaksi internasional menggunakan dollar Amerika Serikat sehingga jika masuk dalam daftar hitam menyulitkan akses ke sistem keuangan Amerika Serikat. Sebagai ilustrasi jangkauan luas dari sektor keuangan Amerika Serikat, walaupun transaksi internasional tampak tidak melibatkan entitas Amerika Serikat atau dollar Amerika Serikat namun pada akhirnya berujung dengan transit pada bank-bank Amerika Serikat.

Dalam hal ini, bagi Amerika Serikat Mesir termasuk sebagai negara entitas ketiga yang menjalin hubungan dengan Korea Utara dan memberikan manfaat bagi pengembangan program rudal Korea Utara. Korea Utara menggunakan *front companies*, fasilitator internasional, misi diplomatik, serta perdagangan di Mesir untuk menjual dan mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan bagi pengembangan rudal. Pada 2015, *front company* Korea Utara yaitu Ocean Maritime Management (OMM) digunakan untuk menyelundupkan senjata dan telah bekerja dengan entitas yang berbasis di Mesir (Leone, 2017). Personil OMM juga terlibat pada firma pelayaran Mesir yakni *Sunlight Agency* di Port Said.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Heather Nauert mengatakan,

“As it pertains to North Korea and Egypt, we continue to work with our allies and partners. Egypt is one of them. We have conversations with Egypt about the need to isolate North Korea, and we do that because we recognize that countries around the world that do business with North Korea enable money to go into North Korea’s illegal nuclear and ballistic weapons programs. And that is a huge concern of ours and it’s a huge concern to the international community as well.” (Elmenshawy, 2017).

Pernyataan tersebut mengindikasikan kekhawatiran Amerika Serikat mengenai hubungan kerja sama militer Mesir dengan Korea Utara yang memfasilitasi keberlangsungan program pengembangan rudal Korea Utara. Selain itu, kekhawatiran Amerika Serikat ditunjukkan melalui

peringkat atensi Amerika Serikat atas Mesir. Peringkat pertama adalah rudal, lalu disusul dengan senjata kimia serta senjata biologis, dan terakhir program nuklir Mesir (Wisconsin Project, 1996). Program nuklir berada pada peringkat ketiga karena Mesir tidak memiliki senjata nuklir dan masih terikat perjanjian damai dengan Israel, meski tidak menutup kemungkinan hal itu dapat berubah. Sehingga kemudian ketika pemerintahan Trump meningkatkan tekanan pada Korea Utara untuk menghentikan program pengembangan rudal, Mesir menjadi salah satu fokus Amerika Serikat.

Presiden Trump melaksanakan pertemuan dengan Presiden Sisi pada 5 Juli 2017. Dalam pertemuan ini Presiden Trump membicarakan ketidaksenangan Amerika Serikat atas hubungan yang terjalin antara Mesir dengan Korea Utara serta membahas ancaman keamanan dari Korea Utara. Presiden Trump menekankan perlunya semua negara, termasuk Mesir, untuk secara penuh menerapkan resolusi DK PBB pada Korea Utara, berhenti menjadi tuan rumah bagi pekerja Korea Utara, dan berhenti memberikan manfaat ekonomi maupun militer ke Korea Utara (White House, 2017). Setelah pertemuan dengan Presiden Sisi, Gedung Putih kemudian merilis pernyataan Presiden Trump dalam laman resmi mereka,

“President Trump stressed the need for all countries to fully implement U.N. Security Council resolutions on North Korea, stop hosting North Korean guest workers, and stop providing economic or military benefits to North Korea” (White House, 2017).

Satu bulan setelah pertemuan tersebut, tepatnya pada tanggal 22 Agustus 2017, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan keputusan untuk memotong atau menanggihkan bantuan ekonomi dan keamanan ke Mesir sebesar \$291 juta (Walsh, 2018). Rinciannya adalah memotong \$96 juta dalam bantuan ekonomi dan militer serta menunda tambahan pendanaan militer senilai \$195 juta (Harris & Walsh, 2017). Selain itu, Amerika Serikat juga mengurangi sebagian dana yang dialokasikan di bawah program bantuan Amerika Serikat ke Mesir, dengan mengurangi komponen ESF

Setelah Amerika Serikat memotong dan menunda bantuan ekonomi kepada Mesir, dalam kunjungan ke Korea Selatan pada 12 September 2017, Menteri Pertahanan Mesir Sedky Sobhy melakukan pernyataan yang menekankan bahwa Mesir telah menghentikan hubungan militer dengan Korea Utara (Harris & Walsh, 2017). Seiring dengan penghentian kerja sama militer dengan Korea Utara, Mesir mengurangi jumlah staf kedutaan Korea Utara di Mesir dari 30 anggota menjadi 20 anggota, sebelum kunjungan Sisi ke KTT PBB, menyusul keluhan Amerika Serikat mengenai peningkatan anggota staf di kedutaan Korea Utara selama dua tahun terakhir (Harris & Walsh, 2017). Selain menghentikan kerja sama militer dengan Korea Utara dan mengurangi perwakilan diplomatik, Mesir juga menghentikan bisnis Korea Utara di Mesir (Soliman, 2017). Amerika Serikat menyajikan daftar perusahaan impor dan ekspor di Mesir yang diduga sebagai *front company* yang membantu operasi transfer senjata rahasia serta pencucian uang. Mesir kemudian secara resmi dan transparan melapor pada Amerika Serikat bahwa senjata yang disita telah dihancurkan dan izin perusahaan yang terlibat dalam impor telah dicabut. Mesir juga berjanji bahwa Egyptian Money Laundering and Terrorist Financing Combat Unity (EMLCU) berkoordinasi dengan Amerika Serikat untuk memastikan bahwa sistem perbankan Mesir tidak digunakan untuk mencuci uang, terutama oleh Korea Utara. Pihak berwenang Mesir juga telah mencegah kapal Korea Utara memasuki Terusan Suez.

Keputusan Presiden Trump memangkas bantuan luar negeri ke Mesir meninggalkan pilihan bagi Mesir untuk menghentikan kerja sama militer dengan Korea Utara sebagai bentuk penyesuaian Mesir terhadap reorientasi kebijakan Amerika Serikat atas program pengembangan rudal Korea

Utara. Setelah langkah penyesuaian yang dilakukan Mesir, pada 20 September 2017 Presiden Trump bertemu dengan Presiden Sisi di sela-sela sidang PBB. Dalam kesempatan itu Presiden Trump menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras Mesir dan menghargai semua yang telah Mesir lakukan. Presiden Trump juga menjawab pertanyaan reporter akan kemungkinan memulai kembali bantuan ke Mesir, yang kemudian dijawab bahwa Amerika Serikat pasti mempertimbangkannya (White House, 2017).

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal berpengaruh terhadap keputusan Mesir menghentikan kerja sama militer dengan Korea Utara yakni Amerika Serikat sebagai negara dominan memiliki kapabilitas *carrot* melalui pemberian bantuan ekonomi dan keamanan. Mesir merupakan penerima bantuan ekonomi Amerika Serikat terbesar kedua setelah Israel dan secara konstan menerima bantuan militer dari Amerika Serikat sekitar \$1,3 miliar setiap tahun, mencakup 80% dari biaya pengadaan senjata Mesir dan merepresentasikan 25% dari pengeluaran tahunan Mesir. Ketika Amerika Serikat melakukan reorientasi kebijakan atas program rudal Korea Utara dari *strategic patience* menjadi tekanan dan keterlibatan maksimum serta menerapkan sanksi sekunder pada entitas negara ketiga yang melakukan bisnis dengan Korea Utara, maka Amerika Serikat menjadikan Mesir sebagai target sanksi sekunder melalui ancaman deprivasi yakni menarik bantuan luar negeri atau menahan keuntungan yang telah diberikan kepada Mesir dengan membekukan bantuan ke Mesir senilai sekitar \$291 juta dan mengurangi sebagian dana yang dialokasikan di bawah program bantuan Amerika Serikat ke Mesir yaitu ESF menjadi \$112.5 juta agar Mesir menghentikan kerja sama militer dengan Korea Utara. Sanksi ini membuat Mesir melakukan penghentian kerja sama militer dengan Mesir dan membuat Korea Utara lebih sulit untuk memperoleh *hard currency*, teknologi, dan sumber daya yang diperlukan untuk memajukan program rudal.

Referensi

- Arab Republic of Egypt Ministry of Foreign Affairs (2017) *Egypt condemns North Korea's sixth nuclear test* [online] tersedia dalam <https://www.mfa.gov.eg/English/MediaCenter/News/Pages/nourthkorean49.aspx> (diakses 21 November 2018).
- Arms Control Association (2017) *Recalibrating U.S. Policy Toward North Korea* [online] tersedia dalam <https://www.armscontrol.org/Issue-Briefs/2017-02-01/Recalibrating-US-Policy-Toward-North-Korea> (diakses 1 Oktober 2018).
- Barnaby, Frank & Nick Ritchie (2004) *North Korea: Problems, Perception, and Proposal*. Oxford: Oxford Research Group
- BBC (2013) *Korut Luncurkan 'Ponsel Pintar' Pertama* [online] tersedia dalam www.bbc.com/indonesia/majalah/2013/08/130813_ipitek_korut_ponsel (diakses 29 Oktober 2017).
- Cha, Victor & Katrin Fraser Katz (2018) *The Right Way to Coerce North Korea* [online] tersedia dalam <https://www.foreignaffairs.com/articles/north-korea/2018-04-01/right-way-coerce-north-korea> (diakses 12 September 2018).
- Crisis Group (2017) *Keeping Egypt's Politics on the Agenda* [online] tersedia dalam <https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/egypt/keeping-egypts-politics-agenda> (diakses 11 Januari 2019).
- CSR Report (2017) *Egypt: Background and U.S. Relations*. Congressional Research Service.
- Davis, Lynn E. et. al. (2012) *U.S. Overseas Military Presence What are the Strategic Choices?* RAND.
- Directorate of Intelligence (2012) *Egypt: Aspirations for Missile Production*. An Intelligence Assessment.
- Directorate of Intelligence (2012) *the Egyptian Arms Industry*. Research Paper.
- El-Fadl, Reem Abou (2015) *Revolutionary Egypt: Connecting Domestic and International Struggles*. Routledge Studies in Middle Eastern Democratization and Government.
- Elmenschawy, Mohamed (2017) *Egypt must play by President Trump's rules on North Korea* [online] tersedia dalam <https://thehill.com/blogs/pundits-blog/international-affairs/349840-egypt-has-no-choice-but-to-play-by-trumps-rules-on> (diakses 21 November 2018).
- Fahmy, Nabil (2012) *Egypt in the World* [online] tersedia dalam <https://www.thecairoreview.com/essays/egypt-in-the-world/> (diakses 21 Maret 2018).
- Fisherman, Edward et. al. *A Blueprint for New Sanctions on North Korea* [online] tersedia dalam <https://www.cnas.org/publications/reports/a-blueprint-for-new-sanctions-on-north-korea> (diakses 13 November 2018).
- Frisch, Hillel (2001) *Guns and Butter in the Egyptian Army*. Middle East Review of International Affairs, Vol. 5, No. 2.

- Harris, Gardiner & Declan Walsh (2017) *U.S. Slaps Egypt on Human Rights Record and Ties to North Korea* [online] tersedia dalam <https://www.nytimes.com/2017/08/22/us/politics/us-aid-egypt-human-rights-north-korea.html> (diakses 11 Desember 2018).
- Hashim, Ahmed S. (2011) *The Egyptian Military, Part One: From the Ottomans through Sadat*. Middle East Policy Vol. xviii, No. 3.
- Howmuch.net (2015) *The U.S. Spends \$35 Billion Helping Out the World. But Where Does All this Money Really Go?* [online] tersedia dalam <https://howmuch.net/articles/countries-scaled-to-the-economic-aid-they-receive-from-us> (diakses 11 Desember 2018).
- Khan, Adnan (2006) *100 Years of the Middle East: the Struggle for the Post Sykes-Picot Middle East*. Maktabalslamia Publications.
- Kirk, Donald (2011) *North Korea and Egypt: Friends with Benefit* [online] tersedia dalam <https://www.pri.org/stories/2011-02-08/north-korea-and-egypt-friends-benefits> (diakses 12 Oktober 2017).
- Leone, Daniel (2017) *Egypt's North Korea Connection* [online] tersedia dalam <http://pomed.org/blog-post/egypts-north-korea-connection/> (diakses 19 Oktober 2017).
- McCurry, Justin (2017) *North Korea's Missile Test: Everything you Need to Know* [online] tersedia dalam <https://www.theguardian.com/world/2017/jul/04/are-north-koreas-missile-claims-true-and-what-do-they-signify> (diakses 1 Oktober 2018).
- Ottoway, Marina (2016) *Between Democratic Values and State Interests: the United States and Egypt after the Uprising*. The Arab Transitions in a Changing World.
- Rabou, Ahmed Abd (2015) *Decision Making in Egypt: What has Changed Since Mubarak?* [online] tersedia dalam <https://timep.org/commentary/analysis/decision-making-in-egypt-what-has-changed-since-mubarak/> (diakses 11 Januari 2019).
- Ragab, Eman (2018) *The national security components of Egyptian foreign policy* [online] tersedia dalam <http://english.ahram.org.eg/NewsContentP/44/292544/Analysis/The-national-security-components-of-Egyptian-forei.aspx> (diakses 11 Januari 2019).
- Ramani, Samuel (2017) *the Egypt-North Korea Connection* [online] tersedia dalam <https://thediplomat.com/2017/08/the-egypt-north-korea-connection/> (diakses 29 September 2017).
- Scobell, Andrew & John Sanford (2007) *North Korea's Military Threat: Pyongyang's Conventional Forces, Weapons of Mass Destruction, and Ballistic Missiles*. Strategic Studies Institute.
- Sharp, Jeremy M. (2014) *Egypt: Background and U.S. Relations*. Congressional Research Services.
- Soliman, Asmahan (2017) *How Egypt is Fixing its North Korea 'Problem'* [online] tersedia dalam <https://www.madamasr.com/en/2017/10/26/feature/politics/how-egypt-is-fixing-its-north-korea-problem/> (diakses 13 Februari 2018).
- Suter, Margaret (2017) *Why is Egypt's Sisi Buying Arms from Kim Jong Un?* [online] tersedia dalam <https://www.newsweek.com/why-egypts-sisi-buying-arms-kim-jong-un-667587> (diakses 6 Maret 2018).

- Swaine, Michael D. & Loren H. Ranyon (2002) "Ballistic Missile Defence in Asia" dalam *NBR Analysis* Vol. 13, No. 2. Washington: the National Bureau of Asian Research.
- United States Department of State and U.S. Agency for International Development (2005) *U.S. Foreign Assistance Reference Guide*. Department of State Publications.
- Walsh, Declan (2018) *Need a North Korean Missile? Call the Cairo Embassy* [online] tersedia dalam <https://www.nytimes.com/2018/03/03/world/middleeast/egypt-north-korea-sanctions-arms-dealing.html> (diakses 6 Maret 2018).
- Warrick, Joby (2017) *Rockets Bound for Egypt Reveal North Korea's Dark Trade* [online] tersedia dalam <http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/ct-north-korea-rockets-egypt-20171001-story.html> (diakses 19 Oktober 2017).
- Wertz, Daniel (2017) *North Korea's Ballistic Missile Program*. Issue Brief NCNK the National Committee on North Korea.
- White House (2017) *Readout of President Donald J. Trump's Call with President Abdel Fattah al Sisi of Egypt* [online] tersedia dalam <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/readout-president-donald-j-trumps-call-president-abdel-fattah-al-sisi-egypt-2/> (diakses 25 Juli 2018).
- White House (2017) *Remarks by President Trump and President Al-Sisi of Egypt Before Bilateral Meeting* [online] tersedia dalam <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-president-al-sisi-egypt-bilateral-meeting/> (diakses 11 Desember 2018).
- White House (2017) *U.S. National Security Strategy* [online] tersedia dalam <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf> (diakses 1 Oktober 2018).
- Wisconsin Project (1996) *Egypt's Missile Efforts Succeed with Help from North Korea* [online] tersedia dalam <https://www.wisconsinproject.org/egypts-missile-efforts-succeed-with-help-from-north-korea/> (diakses 29 Juni 2018).
- Wisconsin Project (2000) *Egypt Nuclear, Chemical and Missile Milestones – 1960-2000* [online] tersedia dalam <https://www.wisconsinproject.org/egypt-nuclear-chemical-and-missile-milestones-1960-2000/> (diakses 16 Februari 2018).
- Yonhap (2017) *S. Korea, Egypt vow ties on N. Korea* [online] tersedia dalam <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170911000940> (diakses 6 Maret 2018).
- Zimmermann, Anne Mariel (2017) *US Assistance, Development, and Hierarchy in the Middle East*. Palgrave Macmillan.